

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Abrory M, “Implikasi Yuridis Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dan Fiktif Negatif”, *negara dan keadilan* (2021) 10 (2)

Andika Risqi Irvansyah, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja *Legal Position of Fitions Administrative Approval Since The Encament Of 'Cipra Kerja' Law*”, *Jurnal APHTN-HAN* (2022) 1(2)

Desy Wulandari. “Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Renaissance*, vol. 5, No.. 1, 2020.

Dewi Asimah, Zainal Muttaqin DCTA *DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Fakultas Hukum Unpad (2020) (4)

Enrico Simajuntak, PROSPEK PRINSIP FIKTIF POSITIF DALAM MENUNJANG KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2018) 7(2).

Fatur Faturhman dan Diki Rahmawan, “Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis”, Jurnal Ilmu Hukum 1 Juni 2024 Nomor 1, Volume 2.

H.A. Lawali Hasibuan, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, Jurnal Legisla 15, No. 2

Heriyanto B, Problematika Penyelesaian Perkara “Fiktif Positif” di Pengadilan Tata Usaha Negara, Palar | Pakuan Law Review (2019) 5(1).

Kamarullah, “Keputusan Tata Usaha Negara Merupakan Perbuatan Hukum Perdata” (Universitas Tanjungpura, 2018)

https://www.researchgate.net/publication/329181987_KEPUTUSAN_TATA_USAHA YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA Karakteristik dan Problematika Penanganan Sengketa ya?enrichId=rgreq-422d583d79634504b6d8a8153e5b70fa-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzOTc5ODdAMTU0MzIyMzAxMTg2MQ%3D%3D&el=1 x 2& esc=publicationCoverPdf

Muhlashin I, “Eksistensi Asas Presumptio Iustae Causa dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Bidang Hukum Publik (PTUN Serang)”. Jurnal Pilar Keadilan (2022) 1 (2)

- N. S. L. Tampubolon, K. W. Utama, and A. Putrijanti, "Penerapan Pemeriksaan Fiktif Positif dalam Upaya Memperoleh Kepastian Hukum di Peradilan Tata Usaha," *Diponegoro Law Journal*, vol. 10, No.. 3, pp. 619-631, Jul. 2021. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.28243>
- Nur S, Susanto H, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal* (2021) 4(3) Hlm.2, yang dikutip dari Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Siallagan H, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Sosiohumaniora* (2016) 18(2)
- Suanro dan Mizan Malik S, *Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* (2021) 6(2)
- Sukmanagara V, Leonard L, Utama K, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura N0 : 11/G/2017/PTUN.JPR)", *Diponegoro Law Journal* (2021) 10(4).

Triartha Yuliani E, Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif dalam UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) (2020) 6(1).

Triartha Yuliani E. “Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif dalam UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Konsep Fiktif Positif dalam UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2020, Jurnal Komunikasi Hukum 6, No. 1.

Wicaksono D, Hantoro B, dan Kurniawan D, Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional (2021) 10(2) Nasional (2021)10(2).

Wuisang A, Tanggungugat Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan”, Pakuan Law Review 7, No.. 2.

B. Buku

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Simanjuntak Enrico, Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi

Artikel Hukum Administrasi (Bekasi : Gramata Publishing, 2018).

Titik Triwulan T dan Ismu Gunandi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta,

Kencana, 2011).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara

Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan

Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

D. Website

Garry Fischer Silitonga, “Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20Edaran%20tidak%20juga%20dikategorikan,menteri%2C%20apalagi%20peraturan%20berhierarki%20lainnya.>

9 Juni 2022 yang diakses pada 14 april 2025, 02.14 WIB.

Nafiatul Munawaroh, “Apa itu SEMA dan Bagaimana kedudukannya dalam hukum?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-SEMA-terhadap-suatu-Undang-Undang-lt5da3d5db300a9/>, 8 Februari 2024 yang diakses pada 13 April 2025, 02.24 WIB.

Sania Mashabi dan Kristian Erdianto, “Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur dan Tertutup dari Publik”, Kompas TV,

[https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari,](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari) diakses
pada 28 April 2025 11.29 WIB